

PENULISAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT



Diajukan oleh :

Lisa Aprilia

NPM : 200513729
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

PENULISAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT



Diajukan oleh:

Lisa Aprilia

NPM : 200513729

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-
PROCUREMENT) DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**



Diajukan oleh:

Lisa Aprilia

NPM : 200513729
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 14 -05-2024

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Riawan Tjandra', written over a faint circular stamp.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Jumat
Tanggal : 21 Juni 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, D.H., M.Hum.

Sekretaris : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

Anggota : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya yang tak terhitung jumlahnya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat**". Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menghadapi banyak tantangan dan kesulitan saat menulis skripsi ini. Namun, berkat bantuan, dukungan, insentif, dan doa dari berbagai pihak, penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang selalu membantu, melindungi, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi untuk memenuhi syarat kelulusan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran;
3. Dekan FH UAJY, Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M.Hum., beserta seluruh jajaran dekanat yang telah memberikan dukungan bagi penulis;
4. Dosen pembimbing penulis yaitu Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan semangat, bimbingan, masukan, ide, dukungan, dan saran dari awal hingga akhir proses penulisan hukum/skripsi penulis.

5. Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum., yang merupakan DPA penulis di FH UAJY yang telah mengarahkan penulis selama menjalani masa studi;
6. Dosen dan Civitas Akademika FH UAJY yang telah memberikan ilmu dan pelajaran bagi penulis selama menempuh pendidikan di FH UAJY;
7. Kedua orang tua penulis yaitu, Bapak Yakobus Dikok dan Ibu Rokana yang selalu mendoakan, memotivasi, memberikan semangat, mendampingi, dan memberikan dukungan bagi penulis baik itu secara moril maupun materiil dalam perkuliahan penulis dari awal hingga akhir;
8. Adik penulis yaitu, Jessica Febrianti dan Liora Pricilla yang telah memberikan semangat untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini;
9. Teman-teman penulis Linda dan Egidia yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta hiburan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini;
10. UKM Marching Band UAJY yang menjadi UKM yang penulis ikuti selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman asrama penulis yaitu Yustina, Karla, Belinda, dan Nopita yang selalu menghibur dan memberi dukungan kepada penulis dalam proses penulisan hukum/skripsi penulis.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum/skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk kritik dan

saran yang dapat membantu melengkapi penulisan hukum/skripsi ini. Semoga semua pembaca mendapatkan manfaat dari penulisan hukum/skripsi ini.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Penulis



Lisa Aprilia



ABSTRAK

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang percaya bahwa konsep negara hukum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan nasional merupakan salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu program yang berkontribusi besar dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi negara adalah pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah didanai oleh APBN/APBD, diawali oleh proses menentukan barang dan jasa yang diperlukan untuk tujuan organisasi pemerintah dan berakhir pada tahap penyerahan hasil pengadaan. Dimana kebijakan dalam proses ini dirumuskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan Perpres ini juga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) didirikan dengan ketentuan teknis operasional yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018. Dalam Pasal 1 Angka 45 Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 didefinisikan bahwa LPSE Daerah Kabupaten Kutai Barat dibentuk oleh keputusan bupati sebagai unit organisatoris pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sejak tahun 2012 pemerintah telah menggunakan e-procurement untuk tender dan seleksi, tetapi belum sepenuhnya untuk semua kegiatan pengadaan. Pengumuman pelelangan, pendaftaran, penjelasan dokumen lelang (aanwijzing), pemasukan dan pembukaan penawaran, penilaian kualifikasi, dan penetapan pemenang adalah semua langkah-langkah dalam proses ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, juga mengetahui apa saja kendala dan cara mengatasi kendala tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dalam penelitian ini objek penelitian hukumnya adalah implementasi aturan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan personil, pemanfaatan teknologi, meningkatkan visibilitas dan pemanfaatan LPSE, pelatihan dan pengembangan Penyedia Lokal di Kabupaten Kutai Barat.

Kata Kunci: E-Procurement, LKPP, LPSE

ABSTRAK

Indonesia is a state of law, which believes that the concept of a state of law can improve the welfare of its people. National development is one of the steps taken to improve the welfare of the Indonesian people. One of the programs that contribute greatly to national development, especially the country's economic development, is the procurement of goods/services by the government. Regulated in Presidential Regulation Number 16 of 2018 that the process of procuring government goods and services funded by APBN / APBD, begins with the process of determining the goods and services needed for the objectives of government organizations and ends at the stage of delivery of procurement results. Where policies in this process are formulated by the Government Goods and Services Procurement Policy Agency (LKPP). Based on this Presidential Regulation, the Electronic Procurement Service (LPSE) is also established with technical operational provisions stipulated in LKPP Regulation Number 14 of 2018. In Article 1 Point 45 of West Kutai Regent Regulation Number 16 of 2017, it is defined that the LPSE of West Kutai Regency is established by a regent decree as an organizational unit in the Goods and Services Procurement Section. Since 2012 the government has used e-procurement for tenders and selection, but not yet fully for all procurement activities. Tender announcement, registration, explanation of tender documents (aanwijzing), bid submission and opening, qualification assessment, and winner determination are all steps in this process. This research aims to find out how the process of implementing electronic procurement of goods/services (e-procurement) in the West Kutai Regency Government, as well as to find out what are the obstacles and how to overcome these obstacles. The method used in this research is normative legal research in which the object of legal research is the implementation of legal rules in the implementation of electronic procurement of goods/services (e-procurement) in the West Kutai Regency Government. The results of the research conducted by the author state that the implementation of electronic procurement of goods/services (e-procurement) in the West Kutai Regency Government is in accordance with applicable regulations but there are still obstacles in the implementation process. Some strategies that can be used to overcome these obstacles include improving the quality of training and development of personnel, utilizing technology, increasing the visibility and utilization of LPSE, training and development of Local Providers in West Kutai Regency.

Keywords: *E-Procurement, LKPP, LPSE*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	4
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Keaslian Penelitian	6
6. Batasan Konsep	11
7. Metode Penelitian.....	12
BAB II PEMBAHASAN	16
A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.....	16

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah.....	16
2. Prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah	19
3. Pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	21
4. <i>E-Procurement</i>	24
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).....	26
6. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kutai Barat.....	28
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.....	35
1. Keterbatasan personil.....	35
2. Kurangnya penyedia.....	38
C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.....	40
1. Mengatasi kekurangan personil.....	40
2. Mengatasi kekurangan penyedia.....	42
BAB III PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa Per-31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.....	31
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik..... **Error! Bookmark not defined.**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 13 Mei 2024

Yang menyatakan,



Lisa Aprilia